

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adnan, I. M. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Aksinuddin, S. (2022). *Hukum Pertanahan*. Malang: Inteligencia Media.
- Kouwagam, S. (2023). *Memenangkan konflik pertanahan*. Jakarta: Gramedia.
- Moechtar, O. (2024). *HUKUM KENOTARIATAN: TEKNIK PEMBUATAN AKTA NOTARIS DAN PPAT*. Jakarta: KENCANA.
- Muchsin, I. K. (2019). *Hukum agraria indonesia dalam perspektif sejarah*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudikno Mertokusumo. (2019). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Achmad Ali. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ramadhan Kasim, A. N. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ramadhani, R. (2024). *Buku Ajar HUKUM PERTANAHAN*. Medan: UMSU PRESS.
- Rudy Indrajaya. (2020). *NOTARIS DAN PPAT SUATU PENGANTAR*. Bandung : Refika Aditama.
- Samosir, D. (2023). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Senjaya, M. (2021). *PENGANTAR PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sitanggang, D. (2023). *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*. Bandung: Reka Cipta.
- Sutedi, A. (2017). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Takariawan, A. (2021). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana di indonesia*. Bandung: Reka Cipta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

## **C. SUMBER LAIN**

Ahmad, P. D., Mokorimban, M. A. T., & Sepang, R. (2019). *Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia*.

Asri, S. (2020). *PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM MENANGGULANGI SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN KAJANG (TELAAH SIYASAH SYAR'IYYAH)*.

- Fitriani, D. (2023). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA*.
- Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 109–130. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.28>
- Lamatenggo, C., Muaja, H., & Rompas, D. (2021). KAJIAN YURIDIS PEMALSUAN SURAT SEDERHANA (PASAL 263 KUHP) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK (PASAL 264 AYAT (1) KE 1 KUHP). *Lex Crimen*, x(1), 73.
- Muwahid. (2017a). METODE PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) OLEH HAKIM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM YANG RESPONSIF. Dalam *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* (Vol. 07).
- Muwahid. (2017b). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 230–245.
- Myranika, A., Pandia, H., & Humulhaer, S. (2022). PENDAFTARAN TANAH DAN FUNGSI PPAT DALAM PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH KELURAHAN MAUK TIMUR. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 1054–1061. <https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3580>
- Suryani Meria. (2022). *PENDAPAT HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM*.
- Syuib, & Aulia, D. S. (2021). Implementasi PTSL Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pertanahan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. *Justisia*, 6(2), 222–227.